

**EFEKTIVITAS MUSRENBANG NAGARI PADA PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH DI SEKTOR PERTANIAN (Studi Kasus :  
Musrenbang Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan)**

Kadri Yulizar, dibawah bimbingan  
(Dr. Drs. Erwin, M.Si dan Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc)

Program Pascasarjana Universitas Andalas, Padang 2014

**ABSTRAK**

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengamanatkan partisipasi dari masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Pelaksanaan musrenbang menentukan solusi yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sehingga akan dihasilkan *output* musrenbang yang efektif yakni sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Permasalahan dalam penelitian ini : 1) Bagaimana prosedur dan mekanisme pelaksanaan musrenbang nagari Kambang, 2) Bagaimana efektivitas Musrenbang Nagari Kambang pada sektor pertanian. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah : 1) Mendeskripsikan proses dan mekanisme pelaksanaan musrenbang nagari Kambang, 2) Menganalisis efektivitas musrenbang nagari Kambang dalam perencanaan pembangunan khususnya pada sektor pertanian. Metode penelitian ini survey dan studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Nagari Kambang.

Efektivitas musrenbang nagari dilihat dari 2 (dua) sisi yakni : 1) proses dan 2) hasil. Dari sisi proses kurang efektif (skor 80%) karena terdapat beberapa kegiatan dalam tahapan musrenbang nagari tidak dilaksanakan. Dari sisi hasil, kegiatan prioritas yang dihasilkan pada musrenbang nagari kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sektor pertanian, yaitu tahun 2012 – 2014 berturut-turut sebesar 62,50%, 57,14% dan 57,14%. Dari data tersebut hasil musrenbang nagari Kambang masih dalam interval 60 - 80% (kurang efektif) dan kurang dari 60% (tidak efektif) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di sektor pertanian.

Kata kunci : *efektivitas musrenbang, perencanaan, kebutuhan*

**Pendahuluan**

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-

undang Nomor 25 tahun 1999 yang juga telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah telah merubah sistem

pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralisasi dan merupakan dasar pelaksanaan otonomi daerah. Sebagai tindak lanjutnya adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang mengamanatkan peran serta atau partisipasi dari masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan diyakini akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan. Hal ini dikarenakan perencanaan dan implementasi pembangunan dilaksanakan atas dasar kebutuhan masyarakat. Efektivitas dan efisiensi dalam pembangunan bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan merupakan solusi yang tepat dari permasalahan dan merupakan kebutuhan masyarakat serta berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Pilihan program dan kegiatan yang

diambil dalam pembangunan haruslah yang paling efisien dan yang paling efektif serta yang paling dibutuhkan dari berbagai alternatif pilihan pembangunan. Proses pemilihan tersebut diperlukan keterlibatan dari masyarakat guna mengetahui permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

Salah satu media bagi masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan pada tahapan perencanaan pembangunan yakni Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang nagari merupakan media memecahkan permasalahan berupa solusi yang menjadi kebutuhan masyarakat (*community need*) di Nagari.

Persoalan mendasar dalam pelaksanaan musrenbang nagari adalah mendapatkan informasi yang akurat tentang persoalan yang ada dan terjadi masyarakat sehingga diperoleh solusi

yang tepat yakni sesuai dengan kebutuhan masyarakat berupa rencana pembangunan. Nagari Kambang yang merupakan wilayah yang potensial pertanian, hasil musrenbang merupakan potret dari sejauhmana pemerintah dan masyarakat dapat mengidentifikasi permasalahan dan menentukan kebutuhan yang diperlukan sebagai solusi dari permasalahan. Sehingga akan dihasilkan *output* musrenbang yang efektif yakni sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya di sektor pertanian.

### **Efektivitas Musrenbang Nagari**

Efektivitas dapat ditunjukkan dari tingkat pencapaian hasil program/kegiatan/aktivitas dengan membandingkan dengan target/tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Disamping itu, efektivitas dapat dilihat dan dinilai dari tingkat kesesuaian

antara rencana dengan hasil yang dicapai.

Djumhana (2007) dalam Azmiardi (2011) menjelaskan bahwa efektivitas yaitu menggambarkan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan antara *outcomes* (hasil) dengan output (keluaran).

Efektivitas musrenbang nagari adalah tingkat kesesuaian antara rencana yang dihasilkan berupa kegiatan prioritas dengan tujuan yang ingin dicapai yakni kebutuhan masyarakat.

Efektivitas musrenbang nagari dapat dilihat dari dua aspek yakni : 1) proses; ada tidaknya proses/kegiatan dilakukan, 2) hasil ; apakah hasil musrenbang nagari sudah didasarkan pada pendekatan kebutuhan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Musrenbang nagari

dikatakan efektif bila keluaran musrenbang nagari berupa kegiatan prioritas merupakan kebutuhan masyarakat. Semakin banyak kegiatan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sektor pertanian, maka makin tinggi tingkat efektivitasnya.

Tingkat pencapaian tujuan dan sasaran adalah sejauhmana hasil musrenbang nagari menghasilkan keluaran (*output*) sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan musrenbang nagari.

### **Kebutuhan**

Kebutuhan didefinisikan sebagai kekurangan yang mendorong masyarakat untuk mengatasinya (Suharto, 2005). Dalam hal ini, asesmen kebutuhan diartikan sebagai penentu besarnya atau luasnya suatu kondisi dalam suatu populasi yang ingin diperbaiki atau penentuan

kekurangan dalam kondisi yang ingin direalisasikan.

Suharto (2005), membagi kebutuhan ke dalam 5 (lima) macam, yakni :

- a. Kebutuhan absolut (*absolute need*) adalah kebutuhan minimal atau kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia agar dapat mempertahankan kehidupannya (*survive*). Seperti kecukupan kalori per orang per hari yang mesti didapatkan dari tiga kali makan oleh masyarakat Indonesia. Nilai kalori merupakan ukuran standar dalam pengukuran dan penentuan kemiskinan oleh banyak ahli di dunia yang kemudian disetarakan dengan uang.
- b. Kebutuhan normative (*normative need*) adalah kebutuhan yang didefinisikan oleh para ahli yang biasanya didasarkan pada standar tertentu. Misalnya penentuan

asupan makanan yang dikonsumsi berdasarkan golongan usia.

- c. Kebutuhan yang dirasakan (*felt need*) adalah sesuatu yang dianggap atau dirasakan orang sebagai kebutuhannya. Setiap orang akan memiliki kebutuhan yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan yang dirasakan tersebut, karena sangat ditentukan oleh persepsi orang yang bersangkutan mengenai sesuatu yang diinginkan pada suatu waktu tertentu.
- d. Kebutuhan yang dinyatakan (*stated need*) adalah kebutuhan yang dirasakan yang diubah menjadi kebutuhan yang dinyatakan berdasarkan banyaknya permintaan. Besarnya kebutuhan ini tergantung pada seberapa orang yang memerlukan kebutuhan ini.
- e. Kebutuhan komparatif (*comparative need*) adalah kebutuhan yang didasarkan pada

perbedaan wilayah atau lainnya. Seperti kesenjangan (*gap*) antara kebutuhan yang diperlukan pada wilayah yang berbeda untuk kelompok orang yang karakteristiknya sama.

### **Perumusan Masalah**

Permasalahan dalam penelitian ini : 1) Bagaimana prosedur dan mekanisme pelaksanaan musrenbang di Nagari Kambang, 2) Bagaimana efektivitas musrenbang nagari Kambang dalam perencanaan pembangunan khususnya pada sektor pertanian.

### **Tujuan Penelitian**

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah : 1) Mendeskripsikan proses dan mekanisme pelaksanaan musrenbang nagari Kambang, 2) Menganalisis efektivitas musrenbang nagari Kambang dalam perencanaan pembangunan khususnya pada sektor pertanian.

## **Metodologi Penelitian**

Metode penelitian ini survey dan studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Metoda survey untuk mendapatkan gambaran karakteristik dari suatu populasi yang berkenaan dengan sikap, tingkah laku, atau aspek sosial lainnya, sedangkan metode studi kasus untuk mendapatkan gambaran secara intensif terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Penelitian ini dilakukan di Nagari Kambang yang kondisi wilayahnya serta mata pencaharian penduduknya merupakan sangat dominan pertanian.

## **Hasil dan Pembahasan**

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pelaksanaan musrenbang nagari kambang yang diamatkan untuk melibatkan masyarakat disetiap tahapannya, pada praktiknya belum semua dalam tahapan pelaksanaan

musrenbang nagari melibatkan masyarakat. Pertama, pada tahapan pra musrenbang yang keluarannya berupa hasil kajian potensi, kondisi dan permasalahan di tingkat kampung, pelaksanaannya tidak melibatkan masyarakat. Hasil dari penggalian gagasan berasal dari usulan peserta yang diundang dan hadir mewakili kampungnya masing-masing yang pelaksanaannya terpusat di kantor Wali Nagari dengan usulan per kampung relatif sama dan tidak mencerminkan kondisi objektif kajian. Kedua, pada tahapan pelaksanaan musrenbang nagari, penentuan kegiatan prioritas dilakukan berdasarkan musyawarah, skala prioritas yang disusun tidak dijadikan pertimbangan. Tingkat kebutuhan ditentukan dengan kesepakatan serta adanya kebijakan pergiliran pembangunan antar kampung. Ketiga, pada pasca musrenbang yang

keluarannya berupa berita acara musrenbang berisi hasil kesepakatan rapat pleno penetapan kegiatan prioritas nagari ditetapkan melalui mekanisme musyawarah serta penunjukan wakil nagari pada musrenbang kecamatan telah sesuai pedoman musrenbang.

**Kebutuhan berdasarkan Kondisi Objektif**

Untuk menentukan peringkat kebutuhan berdasarkan kondisi

objektif, dilakukan penilaian. Penilaian dilakukan dengan menggunakan kriteria yakni (1) Mendukung dalam peningkatan produksi, (2) mendukung peningkatan pendapatan, (3) Keterdesakan/keseringan terjadi pada petani serta (4) dirasakan manfaat oleh banyak petani, yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Skor Prioritas berdasarkan Kebutuhan Objektif

Kebutuhan	Rincian Kebutuhan	Kriteria (skor 1 - 5)				Total Skor	Peringkat
		1	2	3	4		
Individu	1. Bibit	5	5	5	5	20	1
	2. Pupuk	5	5	5	5	20	1
	3. Obat-Obatan	5	4	5	5	19	2
	4. Lahan	5	5	4	4	18	3
	5. Tenaga Kerja/ Alsintan	5	5	3	4	17	4
Komunitas	1. Pasar	3	5	4	5	17	4
	2. Lembaga Perkreditan	4	4	4	5	17	4
	3. Pelayanan Penyuluhan	3	4	3	5	15	5
	4. Ketersediaan Air	5	4	4	5	18	3
	5. Jalan	2	4	4	5	15	6
Wilayah	Transportasi	3	3	3	5	14	6

Dari Tabel 1 diatas terlihat 5 (lima) kebutuhan yang memiliki skor tertinggi yaitu Bibit, Pupuk, Obat-

obatan, Lahan dan Ketersediaan Air. Dari lima kebutuhan tertinggi tersebut 4 (empat) kebutuhan merupakan

kebutuhan individu (bibit, pupuk, obat-obatan dan lahan) sedangkan 1 (satu) kegiatan lainnya adalah kebutuhan komunitas yakni ketersediaan air.

**Kebutuhan berdasarkan yang dirasakan (*Felt Need*) Petani**

Dari hasil survei terhadap petani yang menjadi kebutuhan yang merupakan kekurangan terhadap

permasalahan yang dirasakan oleh petani dalam upaya meningkatkan produksi serta pendapatan petani sehingga perlu ditindaklanjuti melalui kebijakan pemerintah berupa pendanaan dan bantuan dari pemerintah.

Adapun usulan yang disampaikan petani terlihat pada Tabel 2. di bawah ini.

Tabel 2. Usulan Kebutuhan yang dirasakan Petani (*Felt Need*)

No	Usulan Kebutuhan	Jumlah pengusul	%	Peringkat
1	Bantuan Pupuk	27	32,93	1
2	Perbaikan Irigasi	22	26,83	2
3	Bantuan Obat-Obatan	9	10,98	3
4	Modal Usaha	7	8,54	4
5	Bantuan Benih	6	7,32	5
6	Bantuan Alsintan	5	6,10	6
7	Harga	2	2,44	7
8	JUT	1	1,22	8
9	Bantuan Bibit Pala	1	1,22	8
10	Bantuan Bibit Sapi	1	1,22	8
11	Penyuluhan	1	1,22	8
			100	

Dari Tabel 2. diatas terlihat dari jenis usulan berjumlah 11 (sebelas) usulan yang menjadi kebutuhan petani. Dari sejumlah usulan tersebut, terlihat usulan bantuan pupuk yang menjadi kebutuhan dominan yakni sebesar 32,93%, selanjutnya perbaikan irigasi

menjadi kebutuhan prioritas kedua dengan 26,83%, bantuan obat-obatan sebesar 10,98%, bantuan modal usaha sebesar 8,54%, bantuan benih sebesar 7,32%, bantuan alsintan (handtracktor dan Tresher) sebesar 6,10%, stabilitas harga sebesar 2,44% serta JUT, bibit



pala, penyuluhan, dan bantuan bibit sapi masing-masing sebesar 1,22%.

Kebutuhan akan pupuk merupakan faktor yang esensial dalam meningkatkan produksi pertanian terutama padi sawah salah satunya ditentukan pemberian pupuk. sebagaimana disampaikan oleh Nunung et al, (2011) menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi produksi padi sawah antara lain : a) luas lahan, b) bibit, c) pupuk dan d) tenaga kerja.

Sarana irigasi yang mengatur ketersediaan air yang diperlukan dalam menjamin kualitas dan kuantitas tanaman. Peningkatan Produksi padi sawah ditentukan oleh sistem irigasi. Sebagaimana hasil penelitian Mahananto, Sutrisno, dan Ananda (2009) yang menyatakan bahwa sistem irigasi berpengaruh terhadap peningkatan produksi padi sawah.

Hal yang sama juga terjadi pada penggunaan obat-obatan (pestisida) memberikan pengaruh terhadap peningkatan produksi. Hasil penelitian Mahananto, Sutrisno, dan Ananda (2009) yang menyatakan bahwa penggunaan obat-obatan (pestisida) berpengaruh terhadap peningkatan produksi padi sawah pada musim tanam I. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam penggunaannya masih rendah dan disinyalir oleh ketidakberadaan petani dalam memperoleh pestisida serta rendahnya adopsi teknologi petani terhadap penggunaan teknologi (pestisida) dalam usaha taninya yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan.

Modal usaha sangat diperlukan dalam usaha pertanian terutama dalam pengadaan bibit dan upah kerja (Daniel, 2002). Dalam usaha pertanian terdapat 2 (dua) jenis modal yakni modal fisik dan modal manusiawi.

Modal fisik berupa alat-alat pertanian seperti bibit, pupuk, ternak, dan lainnya sedangkan modal manusiawi adalah biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan, latihan dan kesehatan (Daniel, 2002).

Benih merupakan salah satu faktor produksi yang mempengaruhi terhadap peningkatan produksi dan produktivitas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Baihaki (2006), telah disadari pula bahwa 60% - 65% peningkatan produktivitas suatu usaha tani ditentukan oleh faktor penggunaan benih varietas unggul bermutu.

Alsintan dalam usaha tani memiliki peran antara lain meningkatkan kapasitas kerja sehingga luas tanam dan intensitas tanam meningkat, meningkatkan kualitas sehingga ketepatan dan keseragaman proses dan hasil dapat diandalkan dan mutu terjamin, serta meningkatkan produktivitas kerja.

Kebijakan harga ditujukan untuk melindungi petani dan menstabilkan perekonomian dalam bentuk stabilitas harga baik *input* maupun *output*. Tidak adanya keseimbangan harga antara harga input seperti pupuk yang membuat petani sudah membelinya, dengan harga output yang tetap dan bahkan cenderung turun apalagi dikala panen raya.

Bantuan bibit pala dan bibit sapi merupakan tambahan jenis usaha diluar jenis usaha/komoditi yang telah diusahakan. Penambahan jenis usaha/komoditi yang diusulkan petani untuk meningkatkan produktivitas lahan melalui diversifikasi tanaman atau produktivitas kerja yakni menggunakan waktu luang petani.

Penyuluhan pertanian ditujukan untuk membantu petani melaksanakan manajemen usaha tani dengan sebaik-baiknya. Penyuluhan pertanian merupakan pendidikan nonformal bagi

petani dimana mereka dapat belajar sambil berbuat (*learning by doing*). Sasarannya adalah agar petani senantiasa meningkatkan efisiensi dalam usaha taninya.

Lima kebutuhan tertinggi berdasarkan kebutuhan yang dirasakan (*felt need*) adalah : 1) bantuan pupuk, 2) perbaikan irigasi, 3) bantuan obat-obatan, 4) modal usaha dan 5) bantuan benih. Dari lima kebutuhan tertinggi, 4 (empat) kebutuhan merupakan kebutuhan individu (pupuk, obat-obatan, modal usaha dan benih) sedangkan 1 (satu) kebutuhan komunitas yakni perbaikan irigasi.

### **Prosedur dan Mekanisme Musrenbang Nagari Kambang**

Dalam penyusunannya dilakukan melalui mekanisme yakni berupa masukan, proses, hasil dan dampak. Mekanisme tersebut tercermin dari tahapan pelaksanaan musrenbang Nagari yang dilakukan melalui kegiatan persiapan, pelaksanaan dan

pemasyarakatan. Persiapan diimplementasikan melalui tahapan pra musrenbang untuk penggalan gagasan. Tahapan pelaksanaan adalah pelaksanaan musrenbang nagari itu sendiri serta pemasyarakatan adalah pasca musrenbang nagari.

Tahap Pra-Musrenbang, merupakan tahapan yang sangat strategis dalam rentetan pelaksanaan musrenbang. Pada tahap ini dibentuk Tim penyelenggara Musrenbang, Pembentukan Tim Pemandu, Penyusunan jadwal musrenbang nagari, pelaksanaan kajian, penyusunan reviu RPJM dan rancangan RKP Nagari, sosialisasi serta penggalan gagasan. Dari tahapan pra musrenbang akan dihasilkan dokumen berupa rekap data/informasi hasil kajian nagari (per kampung) dan rancangan awal rencana kerja pembangunan (RKP) nagari.

Pada tahap pelaksanaan Musrenbang tingkat Nagari yang

ditujukan untuk mensinkronkan berbagai usulan dan masukan guna menyepakati dan menetapkan kegiatan prioritas yang akan menjadi tanggungjawab Nagari, Kabupaten dan Provinsi beserta anggaran pembiayaannya. Pemisahan kegiatan yang didasarkan atas kegiatan yang akan diselesaikan sendiri oleh nagari sesuai dengan kemampuan dan potensi nagari dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan dibahas dalam forum musrenbang kecamatan.

Dalam proses penentuan kegiatan prioritas dilakukan secara musyawarah. Dari usulan kepala kampung dan delegasi kampung mengusulkan usulannya dan dicatat oleh notulen. Penentuan kegiatan prioritas berdasarkan permasalahan yang terjadi seperti banjir, jalan sawah susah serta berdasarkan azas manfaat. Peringkat kegiatan prioritas yang sudah dibuat

oleh tim penyusun tidak dijadikan pertimbangan dalam musrenbang nagari. Penetapan prioritas kegiatan ditentukan secara musyawarah yang mengedepankan kepentingan nagari.

Selain itu juga telah terjadi kesepakatan diinternal tokoh masyarakat bahwa pelaksanaan pembangunan di nagari Kambang dijalankan secara bergiliran untuk masing-masing kampung setiap tahunnya. Hal ini dilakukan agar terjadinya pemerataan pembangunan.

Penetapan kegiatan prioritas yang didasarkan pada kepentingan nagari bermakna imparsial (kepentingan bersama), yang hanya dihasilkan bila melibatkan sebanyak mungkin melibatkan masyarakat termasuk mengikutsertakan masyarakat yang akan terkena dampak dari keputusan tersebut (Surbakti, 2009).

Tahap pasca musrenbang nagari dimaksudkan untuk menentukan

utusan atau perwakilan dari nagari sebagai peserta musrenbang tingkat kecamatan, membuat rekapitan kegiatan prioritas berdasarkan sumber pembiayaannya dan pagu anggaran yang diperlukan serta mengumumkan hasil pelaksanaan musrenbang nagari kepada masyarakat melalui media informasi yang ada di nagari atau melalui papan pengumuman atau melalui media masjid/mushalla di lingkungan nagari. Sehingga dengan pemasyarakatan hasil musrenbang nagari ini diharapkan masyarakat mengetahui tentang rencana pembangunan nagari.

#### **Efektivitas Musrenbang Nagari Kambang di Sektor Pertanian**

Efektivitas musrenbang nagari dilihat dari 2 (dua) sisi yakni : 1) proses; ada tidaknya kegiatan pada tiap tahapan kegiatan musrenbang nagari dilaksanakan, dan 2) hasil, tingkat capaian hasil musrenbang nagari berupa perencanaan pembangunan

yakni usulan prioritas dengan kebutuhan masyarakat di sektor pertanian.

#### **Efektivitas Musrenbang Nagari berdasarkan Proses**

Secara proses yakni pelaksanaan pra musrenbang di Nagari Kambang kurang efektif, karena beberapa kegiatan dalam tahapan pra musrenbang tidak terlaksana dan walaupun dilaksanakan dalam penyelenggaraannya tidak melibatkan masyarakat secara utuh/sepurna. Berdasarkan analisis menggunakan skor, tahapan pra-musrenbang mendapatkan skor sebesar 62,50%, artinya terdapat terdapat 3 kegiatan yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya dari 8 kegiatan pada tahap pra musrenbang.

Pada tahap pelaksanaannya, proses pelaksanaan musrenbang nagari Kambang sudah efektif dengan skor sebesar 85,71%. Artinya masih terdapat 2 kegiatan yang tidak

dilaksanakan sebagaimana mestinya dari 14 kegiatan pada tahapan pelaksanaan musrenbang nagari. Masih terdapat kekurangan yakni materi musrenbang tidak disediakan secara merata pada semua peserta. Reviu RPJMN dan RKP hanya diperuntukan 1 rangkap per kampung yang dipegang oleh kepala kampung. Sedangkan panduan tentang cara musrenbang tidak disediakan

Sedangkan pada tahap pasca musrenbang, sudah berjalan secara efektif. Namun informasi hasil pelaksanaan musrenbang hanya terinformasikan secara terbatas yakni hanya kepada masyarakat yang diundang dalam musrenbang informasi (100%).

Secara keseluruhan pelaksanaan musrenbang nagari mulai dari tahap pra musrenbang, pelaksanaan sampai pada pasca musrenbang masih kurang efektif (80%) hal ini disebabkan data

yang diperlukan sebagai acuan dalam penentuan tidak tersedia disebabkan tidak adanya tim yang melakukan pengumpulan data tersebut. Artinya dari 25 rincian kegiatan dari semua tahapan musrenbang nagari, hanya terlaksana 20 kegiatan.

### **Efektivitas Musrenbang Nagari berdasarkan Hasil**

Berdasarkan analisis kebutuhan (Individu, Komunitas dan Wilayah) pada sektor pertanian di Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dibutuhkan :

#### **A. Kebutuhan Individu**

Berdasarkan analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan objektif yang merupakan kebutuhan prioritas adalah benih, pupuk, obat-obatan, dan lahan. Bantuan benih pada petani padi sawah, sedangkan bagi tanaman karet dibutuhkan bibit karet yang unggul dan program Inseminasi Buatan (IB) bagi peternak untuk meningkatkan mutu ternak yang akan dihasilkan.

Tingkat penggunaan benih varietas unggul masih rendah yakni sebesar 58,33 dari varietas yang digunakan untuk benih (6 varietas unggul dan 1 unggul lokal dari 12 jenis varietas yang digunakan). Berdasarkan jumlah petani yang menggunakan benih berlabel sebanyak 12,28%. Berdasarkan luas lahan yang menggunakan benih unggul dan berlabel adalah sebesar 28,63% yang menggunakan benih berlabel dari varietas unggul. Sedangkan selebihnya yakni sebesar 78,37% menggunakan varietas unggul dan tidak unggul serta dihasilkan dari produksi sendiri. Kondisi ini masih rendah dari hasil kajian BPK Kecamatan Lengayang yang menyatakan bahwa tingkat penggunaan benih unggul dan berlabel untuk wilayah kecamatan adalah 40,25% dan pergiliran varietas sebesar 40,13%. Begitu juga halnya dengan penggunaan bibit unggul di subsektor

perkebunan dimana bibit diperoleh dari anakan karet yang tumbuh secara alami atau dari kebun karet petani lain sedangkan komodi sawit benihnya dipasok dari medan. Penggunaan bibit unggul pada tingkat petani Kecamatan Lengayang untuk komoditi sawit sebesar 50,50% dan karet sebesar 25,55% (BPK Kec Lengayang 2014). Pada subsektor peternakan, tingkat penggunaan inseminasi buatan (IB) untuk meningkatkan kualitas bibit sangat rendah hanya sebesar 20% sedangkan selebihnya yakni sebesar 80% menggunakan kawin alam dari jenis sapi pesisir. Sedangkan BPK Kecamatan Lengayang merilis bahwa penerapan imunisasi buatan (IB) di tingkat peternak sebesar 35%.

Penggunaan pupuk berimbang yang masih rendah dikarenakan daya beli masyarakat yang masih rendah dibutuhkan bantuan pupuk. Umumnya petani menggunakan pupuk Urea, SP-

36 dan KCL dalam usaha tani padi sawahnya. Sedangkan pada subsektor perkebunan komoditi karet tidak diberikan pupuk sedangkan pada komoditi sawit pemberian pupuk diberikan atas takaran dari petani.

Lahan yang sempit menyebabkan kurang efisien dalam biaya produksi. Rata-rata petani padi sawah di Nagari Kambang mengolah lahan sawah seluas 0,66 ha dengan hasil produksi rata-rata 4,07 ton/ha. Pada subsector perkebunan luas lahan yang dikelola oleh petani juga masih dalam kategori perkebunan rakyat yakni < dari 5 ha. Untuk komoditi karet, luas lahan yang dikelola adalah seluas 1,23 ha dan komoditi sawit dengan luas lahan seluas 1,8 ha.

## **B. Kebutuhan Komunitas**

Pemasaran produk pertanian dilakukan secara langsung ke pedagang pengumpul/tengkulak/toke oleh petani yang dilakukan setelah selesai panen.

Dalam menjalankan usaha tani, petani umumnya menggunakan modal sendiri tanpa bantuan modal dari lembaga perkreditan.

Sedangkan untuk pelayanan penyuluhan telah diberjalan secara periodik yakni 2 – 4 kali dalam sebulan pertemuan antara penyuluh dengan kelompok tani. Untuk ketersediaan air yang mendukung usaha tani pada subsektor padi sawah, kondisi baik dalam pengertian walau terjadi pendangkalan dan penyempitan pada saluran sekunder namun air tidak hilang. Tingkat kerusakannya saluran sekunder sekitar 25%. Irigasi dikatakan rusak bila luas hamparan sawah yang terairi kurang dari 50% dan saluran dikatakan rusak bila debit air kurang dari 70% dari debit maksimum.

Jalan usaha tani yang digunakan untuk mendukung mobilitas alsintan dan distribusi hasil produk pertanian, baru tersedia sepanjang 2 km atau



5,73% dari kebutuhan luas hamparan. Sedangkan untuk kualitas jalan desa/nagari, jalan kecamatan dan jalan kabupaten yang melewati nagari kambang dalam kondisi baik

### C. Kebutuhan Wilayah

Dalam menunjang produksi yakni mengurangi biaya produksi agar efisien, ketersediaan sarana transportasi dari daerah penghasil ke pusat ekonomi sangat diperlukan. Dalam hal ini, sarana transportasi dalam mendukung distribusi hasil produk pertanian di nagari kambang cukup baik. Artinya semua kampung

yang ada diwilayah nagari kambang terjangkau oleh sarana transportasi.

Dari identifikasi masalah dan analisis kebutuhan masyarakat di sektor pertanian di Nagari Kambang dapat diketahui tingkat efektivitas musrenbang nagari kambang dengan menyangdingkan antara hasil kegiatan prioritas hasil musrenbang nagari Tahun 2012 dengan kebutuhan masyarakat (berdasarkan kondisi objektif (Tabel 1) dan kebutuhan yang dirasakan (Tabel 2), sebagaimana terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Tingkat Kesesuaian Hasil Murenbang Nagari dengan Kebutuhan Masyarakat (kondisi objektif dan kebutuhan yang dirasakan) Tahun 2012.

Hasil Musrenbang	Kebutuhan (kondisi Objektif)	Kebutuhan yang dirasakan	Kesesuaian
Bantuan Benih melalui BLBU	Benih	Bantuan Benih	Sesuai
Integrasi Sawit dgn ternak			Tidak Sesuai
Pengadaan Pupuk	Pupuk	Bantuan Pupuk	Sesuai
Pengadaan Obat-obatan	Obat-Obatan	Bantuan Obat-obatan	Sesuai
Perbaikan Tali Bandar	Ketersediaan Air	Perbaikan Irigasi	Sesuai
Pengadaan Mesin Bajak	Alsintan	Bantuan Alsintan	Sesuai
Pembuatan Sawah Baru di Medan Baik, Talang TS, Kayu Kalek dan Padang Limau Manis			Tidak Sesuai
Pengadaan Bibit Coklat			Tidak Sesuai

Dari Tabel 3 diatas, terlihat bahwa hasil musrenbang nagari pada tahun 2012, dari 8 kegiatan yang diprioritaskan terdapat 5 kegiatan yang sesuai dengan analisis kebutuhan (62,50%) dan 3 kegiatan yang lain tidak sesuai dengan kebutuhan.

Sedangkan untuk tahun 2013, tingkat efektivitas musrenbang nagari

kambang dengan menyandingkan antara hasil kegiatan prioritas hasil musrenbang nagari Tahun 2013 dengan kebutuhan masyarakat (berdasarkan kondisi objektif (Tabel 1) dan kebutuhan yang dirasakan (Tabel 2)), sebagaimana terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Tingkat Kesesuaian Hasil Murenbang Nagari dengan Kebutuhan Masyarakat (kondisi objektif dan kebutuhan yang dirasakan) Tahun 2013.

Hasil Musrenbang	Kebutuhan (kondisi Objektif)	Kebutuhan yang dirasakan	Kesesuaian
Bantuan Benih melalui BLBU	Benih	Bantuan Benih	Sesuai
Integrasi Sawit dgn ternak			Tidak Sesuai
Pengadaan Pupuk	Pupuk	Bantuan Pupuk	Sesuai
Pemb. Jaringan Irigasi Teknis (3 km)	Ketersediaan Air	Perbaikan Irigasi	Sesuai
Bantuan Handtracktor	Alsintan	Bantuan Alsintan	Sesuai
Pengadaan Bibit Karet, sawit dan Gambir	Bibit		Tidak Sesuai
Penggemukan Sapi dan Bantuan Kambing			Tidak Sesuai

Dari Tabel 4 diatas, terlihat bahwa hasil musrenbang nagari pada tahun 2013, dari 7 kegiatan yang diprioritaskan terdapat 4 kegiatan yang sesuai dengan analisis kebutuhan (57,14%) dan 3 kegiatan yang lain tidak sesuai dengan kebutuhan.

Sedangkan untuk tahun 2014, tingkat efektivitas musrenbang nagari kambang dengan menyandingkan antara hasil kegiatan prioritas hasil musrenbang nagari Tahun 2014 dengan kebutuhan masyarakat (berdasarkan kondisi objektif (Tabel 1) dan kebutuhan yang dirasakan (Tabel 2)), sebagaimana terlihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Tingkat Kesesuaian Hasil Murenbang Nagari dengan Kebutuhan Masyarakat (kondisi objektif dan kebutuhan yang dirasakan) Tahun 2014.

Hasil Musrenbang	Kebutuhan (kondisi Objektif)	Kebutuhan yang dirasakan	Kesesuaian
Bantuan Benih melalui BLBU	Benih	Bantuan Benih	Sesuai
Integrasi Sawit dgn ternak			Tidak Sesuai
Pengadaan Pupuk	Pupuk	Bantuan Pupuk	Sesuai
Perbaikan Tali Bandar, Pemb. Jaringan Irigasi Teknis (3 km)	Ketersediaan Air	Perbaikan Irigasi	Sesuai
Bantuan Handtracktor	Alsintan	Bantuan Alsintan	Sesuai
Penggemukan Sapi dan Bantuan Kambing			Tidak Sesuai
Program SRI/PTS			Tidak Sesuai

Dari Tabel 5 diatas, terlihat bahwa hasil musrenbang nagari pada tahun 2013, dari 7 kegiatan yang diprioritaskan terdapat 4 kegiatan yang sesuai dengan analisis kebutuhan (57,14%) dan 3 kegiatan yang lain tidak sesuai dengan kebutuhan.

Bila dilihat dari hasil musrenbang nagari tertinggi diperoleh tahun 2012 yakni 62.50% artinya dari 8 usulan kegiatan prioritas yang dihasilkan pada musrenbang nagarim terdapat 5 usulan yang merupakan kebutuhan masyarakat. Terendah

terlihat pada tahun 2013 dan tahun 2014 dimana terdapat 4 kegiatan prioritas yang merupakan kebutuhan masyarakat (57,14%) dari 7 kegiatan prioritas yang ditetapkan.

Sesuai kriteria tingkat keefektifitas musrenbang nagari pada penelitian ini, yakni musrenbang nagari dikatakan efektif bila tingkat kesesuaian antara musrenbang nagari dengan kebutuhan masyarakat pada interval 81 – 100%, kurang efektif bila tingkat kesesuaian musrenbang nagari dengan kebutuhan masyarakat pada interval 61 – 80% dan tidak efektif bila kurang dari 60% tingkat kesesuaiannya.

Berdasarkan analisis keefektifan musrenbang nagari Kambang terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat di sektor pertanian masih rendah yakni pada tahun 2012 tingkat efektivitas musrenbang nagari kambang adalah kurang efektif (62,50%), tahun 2013

tingkat efektifitas musrenbang nagari kambang adalah tidak efektif (57,14%), begitu juga pada tahun 2014 tingkat efektivitas musrenbang nagari kambang adalah tidak efektif (57,14%).

## **Kesimpulan**

1. Prosedur dan Mekanisme pelaksanaan Musrenbang Nagari di Nagari Kambang Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan sebagai bagian integral dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah, pelaksanaannya musrenbang nagari sebagai berikut :

- a. Tahapan pra musrenbang, pada tahapan ini dilakukan kajian atau survey kewilayahan berupa potensi, kondisi dan permasalahan wilayah yang tahun 2012 – 2014 tidak dilaksanakan dan hanya dilaksanakan pada tahun 2010

oleh tim penyusun dan tidak melibatkan masyarakat. Dari data tersebut akan didiskusikan pemecahan masalahnya dan ditetapkan strategi sebagai solusi permasalahannya yang akan menjadi kebutuhan masyarakat.

b. Tahapan Pelaksanaan, tahapan ini adalah untuk merekap usulan dari setiap kampung dan menetapkan kegiatan prioritas. Penentuan prioritas kegiatan dilakukan dengan musyawarah pada musrenbang nagari yang dikoordinir oleh Bamus, LPMN dan Wali Nagari serta adanya kesepakatan untuk menggilirkan pembangunan per kampung demi pemerataan pembangunan.

c. Pasca Musrenbang, tahapan ini adalah menyusun Rencana Pembangunan Nagari

berdasarkan hasil pelaksanaan musrenbang Nagari, menentukan tim yang akan di utus pada kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan serta menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang hasil keputusan musyawarah musrenbang nagari serta membuat peraturan nagari tentang RPJM dan RKP Nagari.

2. Efektivitas Musrenbang Nagari kembang dilihat dari dua aspek yakni secara proses serta hasil. Kedua aspek ini saling berhubungan erat dimana untuk mendapatkan hasil yang baik ditentukan oleh proses yang baik/benar secara prosedur dan mekanisme.

a. Secara Proses, pelaksanaan musrenbang nagari di Nagari

Kambang Kecamatan  
Lengayang Kabupaten Pesisir  
Selatan belum semua rincian  
tahapannya dilaksanakan sesuai  
dengan prosedur dan  
mekanisme yang berlaku.  
Secara proses, terdapat 5 (lima)  
kegiatan dari 25 (duapuluh  
lima) kegiatan dalam tahapan  
musrenbang nagari tidak  
dilaksanakan, sehingga  
persentase efektivitas  
musrenbang nagari sebesar 80%  
(5/25), masih dalam kategori  
kurang efektif.

- b. Hasil berdasarkan pada  
kesesuaian dengan kebutuhan  
sektor pertanian. Dari hasil  
musrenbang belum sepenuhnya  
sesuai dengan kebutuhan  
pertanian di nagari Kambang.  
Terdapat kegiatan yang  
diusulkan dan ditetapkan  
sebagai kegiatan prioritas baik

dari hasil musrenbang nagari  
yang bukan kebutuhan  
masyarakat khususnya di sektor  
pertanian. Dalam pelaksanaan  
musrenbang nagari selama 3  
tahun (tahun 2012 – tahun  
2014) persentase keefektifan  
musrenbang nagari Kambang  
masih rendah yakni sebesar  
62,50%, 57,14% dan 57,14%.  
Walau menunjukkan peningkatan  
namun secara keseluruhan  
pelaksanaan musrenbang nagari  
Kambang masih kurang efektif  
(60 - 80%) dan tidak efektif (<  
dari 60%)

### **Saran**

1. Musrenbang Nagari bukan  
hanya menghasilkan daftar  
usulan kegiatan, akan tetapi  
hasil musrenbang nagari  
sesungguhnya adalah proses  
untuk mendapatkan usulan itu  
sendiri. Artinya hasil yang baik

dihasilkan atau atau didukung dengan proses yang baik/benar secara prosedur dan mekanisme.

2. Untuk meningkatkan efektivitas musrenbang nagari baik dari sisi proses, maka prosedur dan mekanisme serta tahapan musrenbang harus dilalui dengan baik. Terutama dalam mendapatkan informasi tentang potensi, kondisi dan permasalahan dari masyarakat agar diperoleh data yang sah untuk menentukan tindakan yang tepat sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi. Sedangkan efektivitas dari segi hasil yakni hasil musrenbang yang sesuai dengan kebutuhan, maka data kajian potensi, kondisi dan permasalahan nagari sangat penting dalam pembuat perencanaan,

menentukan tujuan serta menentukan tindakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan sehingga pembangunan yang dilaksanakan lebih tepat sasaran yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- Arikunto, S, 2010, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Azmiardi, 2011, *Efektivitas Penyusunan Dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005* (skripsi), Fakultas Ekonomi Unhas, Makassar
- Baihaki, A, 2006, *Manfaat dan Implemetasi UU No.29 Tahun 2000 tentang PVT dalam Pembangunan Industri Perbenihan*; Makalah disampaikan pada Kongres Komisi Daerah Plasma Nutfah se Indonesia di Balikpapan, Kaltim.
- BPS, 2011, *Pesisir Selatan Dalam Angka 2011*, Padang
- BPS, 2013, *Statistik Daerah Kabupaten Pesisir Selatan*, Padang.

- BPS, 2013, Indikator Ekonomi Pesisir Selatan, Padang.
- Creswell, J, W, 2009, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Edisi Ketiga, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Daniel, M, 2002, Pengantar Ekonomi Pertanian, Bumi Aksara, Jakarta.
- Ditjen Bangda, 2008, Pedoman Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan, Depdagri. Jakarta.
- Ditjen Perkebunan Kementan, 2013, Pedoman Teknis Pengembangan Sistem Pertanian Berbasis Tanaman Tahunan, Kementan, Jakarta
- Direktorat PAI, 2014, Pedoman Teknis Pengembangan Jaringan Irigasi, PLA, Kementan, Jakarta.
- Djohani, R, 2008, Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Bandung.
- Mahananto, Sutrisno, J., Ananda, CF., 2009, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produksi Padi; Studi Kasus di Kecamatan Nogosari, Boyolali, Jawa Tengah, Wacana Vol. 12 No. 1
- Nunung et al, 2011, Analisis Efisiensi UsahaTani Padi di Beberapa Sentra Produksi Padi di Indonesia, Jurnal Agro Ekonomi Vol. 1 : 12-48.
- Suharto, E, 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Refika Aditama, Bandung.
- Surbakti, R, 2009, Demokratis Deliberatif dan Partisipatif dalam Politik dan Pemerintahan Indonesia (editor : Andi Ramses M dan La Bakri), MIPI, Jakarta
- Peraturan perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Kepmendagri Nomor 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
- SE Mendagri No. 414.2/1408/PMD Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa.